

Journal of Integrative International Relations, 8:1 (2023) 15-27
Copyright © Department of International Relations UIN Sunan Ampel Surabaya
ISSN 2477-3557 (Print) 2797-0345 (Online)
DOI: 10.15642/jiir.2023.8.1.15-27

Peran Amerika Serikat dan Inggris terhadap Stabilitas Politik dan Keamanan Yordania dalam Perspektif Neorealisme

Ghea Azzura Adhy Pramesvari

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

E-mail: gheaazzura111@gmail.com

Muhamad Syahril Jumhur

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

E-mail: sjahriljr88@gmail.com

Sovia Lativa

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

E-mail: wahyuwulandari01092002@gmail.com

Abstract

The United States (US) and UK have been Jordan's important partners since the country's early days until the present era. The formation of the Jordanian state was inseparable from the intervention of UK, which at that time won World War I. In the post-World War II era until the 2011 Arab Spring, the Middle East was a region that was always volatile and unstable. However, Jordan and its Hashemite Monarchy became one of the Arab countries that survived this turmoil and have survived to this day, 2022. The research focus of this article is to understand how the roles of the two Western powers can provide political stability and security for Jordan. The research method used is descriptive qualitative research method with data collection techniques through literature review. This study uses the theory of neorealism and the concept of bandwagoning which is its derivative as an analytical framework. The research result of this article is that Jordan applies the bandwagoning method by establishing very close political and security relations with the US and the UK. This relationship led to the US giving Jordan the status of a Major non-NATO Ally (MNNA). Jordan also chose bandwagoning against Israel which is a major US ally and previously a source of threat to the Arab nation. This has affected Jordan's political and security stability from internal and external threats until the present era.

Amerika Serikat (AS) dan Inggris merupakan mitra penting Yordania sejak masa awal negara tersebut berdiri sampai era sekarang. Pembentukan negara Yordania tidak

terlepas dari campur tangan Inggris yang pada saat itu menjadi pemenang Perang Dunia I. Di era pasca Perang Dunia II sampai masa Arab Spring 2011, Timur Tengah menjadi kawasan yang selalu bergejolak dan tidak stabil. Namun, Yordania dan Monarki Hashemite-nya menjadi salah satu negara Arab yang selamat dari gejolak tersebut dan tetap bertahan hingga masa sekarang, 2022. Fokus penelitian artikel ini adalah memahami bagaimana peran dua kekuatan Barat tersebut dapat memberikan stabilitas politik dan keamanan bagi Yordania. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui telaah kepustakaan. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis berupa Teori Neorealisme dan konsep bandwagoning yang merupakan turunannya.. Hasil penelitian dari artikel ini adalah Yordania menerapkan metode bandwagoning dengan menjalin hubungan politik dan keamanan yang sangat erat dengan dua AS dan Inggris. Hubungan tersebut sampai membuat AS memberikan Yordania status Major non-NATO Ally (MNNA). Yordania juga memilih bandwagoning terhadap Israel yang merupakan sekutu utama AS dan sebelumnya menjadi sumber ancaman bangsa Arab. Hal tersebut berpengaruh pada bertahannya stabilitas politik dan keamanan Yordania dari ancaman internal maupun eksternal sampai era sekarang.

Keywords: Yordania, Inggris, Amerika Serikat, Stabilitas Politik Keamanan

Pendahuluan

Hubungan baik antara Yordania dengan AS dan Inggris sudah dikenal lama. Berdirinya Kerajaan Yordania tidak terlepas dari pengaruh Inggris di dalamnya. Selain itu, Yordania dianggap mitra penting AS di kawasan Timur Tengah untuk membendung pengaruh komunisme.

Dalam sejarahnya, sebelum Perang Dunia Pertama, kawasan Timur Tengah dikontrol oleh Kekhalifahan Turki Utsmani. Kemudian, Perang Dunia Pertama berlangsung tahun 1914-1918 yang dimenangkan oleh kubu Inggris memberikan jalan bagi Inggris dan Prancis untuk pembentukan negara-negara baru di kawasan Timur Tengah. Saat perang masih berlangsung, disepakatinya Perjanjian Sykes-Picot menjadi cikal bakal terbentuknya negara Yordania dan peta politik Timur Tengah secara umum.

Pada tahun 1918, kekuatan Inggris dan Prancis membagi sebagian Timur Tengah menjadi bagian-bagian di bawah pengaruh kekuatan Inggris dan Prancis, dimana wilayah Yordania berada di bawah Mandat dan Wali Inggris. Yordania di bawah mandat Inggris dipimpin oleh Abdullah bin Al Husain sebagai Amir pertama pada 1921. Yordania didirikan sebagai negara keemiratan dengan nama Emirat Transyordania dengan mempertimbangkan hukum untuk menerapkan hukum Islam karena Yordania adalah negara Muslim. Lalu, Yordania merdeka pada tahun 1946 dan menjadi Kerajaan Hashemite.

Setelah Perang Dunia II berakhir, timbul Perang Dingin antara dua kekuatan besar saat itu, yaitu Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Kawasan Timur Tengah

merupakan salah satu hot spot yang menjadi perebutan pengaruh antara dua kekuatan super power tersebut. Timur Tengah selalu mengalami konflik antar negara pada saat itu, seperti Perang Enam Hari 1967 antara Israel melawan Mesir, Yordania, dan Suriah, Perang Yom Kippur 1973, Perang Irak-Iran, invasi Irak ke Kuwait, invasi Israel ke Lebanon, dan pendudukan Suriah di Lebanon. Perang-perang tersebut terjadi sangat berdekatan dengan wilayah Yordania, dan sebagian melibatkannya langsung.

Kemudian setelah Perang Dingin berakhir, isu di Timur Tengah beralih ke terorisme yang dipicu peristiwa 9/11 WTC di AS tahun 2001. Lalu terjadi invasi AS ke Irak tahun 2003 dengan dalih Irak menyembunyikan senjata pemusnah massal. Invasi tersebut menumbangkan rezim Saddam Husein. Pada tahun 2011, meletus peristiwa Arab Spring yang mendorong demokratisasi di Timur Tengah. Peristiwa tersebut, namun, berdampak pada perang saudara yang berkepanjangan dan menimbulkan krisis politik dan keamanan manusia di kawasan. Gelombang Arab Spring telah menumbangkan rezim diktator Hosni Mubarak di Mesir, Moammar Khaddafi di Libya, Ali Abdullah Saleh di Yaman, dan Zein El Abidine Ben Ali di Tunisia.

Di sisi lain, Rezim Bashar Al Assad di Suriah berhasil bertahan dari gejolak dalam negerinya, tetapi negaranya mengalami kerusakan besar setelah perang saudara yang sangat panjang. Suriah dan Irak juga susah payah melawan kelompok teroris yang berusaha mendirikan negara baru di wilayah dua negara tersebut. Kelompok teroris yang menamakan dirinya Islamic State of Iraq and Syria telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang berat di Timur Tengah.

Yordania yang secara geografis berada di tengah-tengah peristiwa tersebut berhasil bertahan dari krisis dan perang saudara. Rezim Monarki Hashemite pun masih bertahan dan tidak jatuh oleh isu demokratisasi di Arab Spring. Jadi, negara-negara Timur Tengah yang identik dengan intensifnya konflik, tetapi Yordania menjadi salah satu negara Timur Tengah yang bertahan dan stabil secara politik dan keamanan. Dari hal tersebut, artikel ini berupaya menjelaskan bagaimana pengaruh AS dan Inggris dalam kestabilan politik-keamanan Yordania dan bagaimana Yordania memanfaatkan pengaruh tersebut.

Dalam menganalisis peran Inggris dan Amerika Serikat di Yordania, metode yang digunakan oleh penulis berupa deskriptif-kualitatif. Menurut Sugiyono metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti objek yang alamiah yang mana peneliti sebagai instrumen kunci. Dalam mengumpulkan data menggunakan teknik gabungan. Melalui pendekatan tersebut, dari hasil analisis data dapat berupa kata-kata, gambar, atau perilaku. Jadi, data diperoleh dengan memberikan pemaparan atau memberikan suatu gambaran mengenai fenomena yang nantinya diteliti. Penelitian ini memiliki kerangka berpikir berupa teori neorealisme dan konsep bandwagoning.

Dalam menganalisis hubungan antara Yordania, Inggris, dan Amerika Serikat, terdapat penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai gambaran mengenai teori neorealisme dan konsep bandwagoning. Pertama, terdapat jurnal milik Montratama dan Yani (2017), dalam jurnal tersebut penulis mengkritik Teori Perimbangan Kekuatan dan memberikan adanya strategi alternatif. Terdapat dua strategi bagi negara lemah saat menghadapi lawan yang lebih kuat, yaitu balancing dan bandwagoning. Bagi negara lemah yang netral yang tidak cocok dengan strategi tersebut, maka perlu adanya strategi yang lain, yaitu strategi bargaining. Kedekatan hubungan antara Indonesia dengan AS dan China, menjadi nilai tambah dalam perimbangan kekuatan terhadap ancaman yang datang dari Malaysia beserta aliansi Five Power Defense Arrangement (FPDA). Indonesia sebagai negara netral tidak cocok menggunakan balancing dan bandwagoning, sehingga perlu adanya alternatif, yaitu konsep bargaining. Konsep bargaining akan efektif dilakukan oleh Indonesia apabila dilihat dari seberapa jauh kerjasama yang terjalin dengan negara mitranya dalam bidang politik dan keamanan hingga menjadi kuasi aliansi. Kedua, jurnal milik Wexler (2006) menganalisis mengenai teori neorealisme yang kesulitan dalam Uni Eropa. Eropa melihat bahwa kerjasama antar negara memiliki peluang yang luas di era kontemporer dan menganggap bahwa lembaga-lembaga Uni Eropa memiliki peran penting. Neorealis memiliki pendapat berbeda bahwa kerjasama akan sulit dibangun dan dipertahankan. Dalam jurnal tersebut, terdapat penjelasan mengapa negara di Eropa lebih umum dalam menggunakan bandwagoning daripada balancing serta konsisten dengan realisme.

Teori Neorealisme dan Konsep Bandwagoning

Neorealisme merupakan teori yang digagas oleh Kenneth Waltz dalam bukunya *Theory of International Politics* (1979). Teori tersebut lahir dengan ambisi ilmiah behaviorisme. Dalam teorinya, Waltz memfokuskan pada 'struktur' sistem internasional dan akibat dari struktur tersebut terhadap hubungan internasional. Gagasan Waltz dalam teori tersebut mengatakan: (i) Sistem internasional itu bersifat anarki, yakni berarti tidak ada pemerintahan dunia. (ii) Sistem internasional terdiri dari unit yang serupa, yaitu baik negara besar maupun kecil sama-sama menjalankan rangkaian fungsi pemerintah yang seragam, seperti pengumpulan pajak, dan pertahanan nasional.¹

Selain itu, Waltz juga berpendapat bahwa politik perimbangan kekuatan akan dapat terjadi apabila dua syaratnya terpenuhi, antara lain: (i) situasi global yang tetap anarki dan (ii) situasi global yang dipenuhi negara-negara yang berambisi mempertahankan eksistensinya. Upaya mempertahankan tersebut dapat diwujudkan dengan dua cara, yaitu (i) memperkuat kekuatan dalam negeri yang meliputi kekuatan militer dan ekonomi, (ii) membangun hubungan luar negeri untuk menciptakan kekuatan eksternal, seperti berupa aliansi dengan negara lain.

Stephen Walt menambahkan pendapat bahwa terdapat dua cara menghadapi kekuatan asing yang lebih kuat, yaitu *balancing* dan *bandwagoning*. Secara sederhananya, *balancing* adalah metode menghadapi sumber ancaman dengan mengimbangi atau melebihi kekuatan sumber ancaman, baik kekuatan internal maupun eksternal. Sedangkan *Bandwagoning* adalah upaya mempertahankan diri dari sumber ancaman dengan merapat (tunduk) ke sumber ancaman tersebut.²

Pada umumnya, *Bandwagoning* merupakan pilihan terakhir suatu negara dalam menghadapi sumber ancaman, karena pada dasarnya setiap negara tidak ingin mengalah kepada kepentingan negara lain. Kebijakan *bandwagoning* biasanya diambil ketika terdapat resiko yang besar untuk ditanggung suatu negara, apabila tidak menuruti tantangan dari sumber ancamannya.³

Sejarah Terbentuknya Yordania dan Keterlibatan Inggris di dalamnya

Yordania yang memiliki nama resmi Kerajaan Hasyimiyah Yordania atau Al-Mamlaka Al-Urduniyyah Al-Hasyimiyah merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Barat, tepatnya di Tepi Barat sungai Yordan, berbatasan dengan Israel dan Palestina di barat, Arab Saudi di timur dan tenggara, Irak di timur laut, dan Suriah di utara. Sebelum Perang Dunia Pertama berakhir, negara ini merupakan bagian dari Kekhalifahan Turki Utsmani selama kurang lebih empat abad (1517 M-1918 M). Kemudian akibat kekalahan Turki Utsmani dari perang tersebut, seluruh wilayah Turki Utsmani yang tersisa di wilayah Arab diserahkan kepada pemenang perang saat itu, yaitu Inggris dan Perancis.

Sebelum Perang Dunia I meletus pada tahun 1914, Turki Utsmani yang sejak tahun 1908 dipimpin oleh kaum Turki Muda sangat berambisi untuk memperkuat cengkeramannya atas provinsi-provinsi Arab nya melalui penerapan birokrasi pemerintah pusat Turki Utsmani yang lebih ketat. Upaya tersebut seringkali juga disebut upaya sentralisasi, sampai-sampai pada penggunaan Bahasa Turki sebagai bahasa resmi khilafah di sekolah-sekolah dan administrasi publik menggantikan Bahasa Arab di wilayah Arab. Kebijakan tersebut tentunya mengesampingkan masyarakat Arab dan malah menimbulkan gerakan nasionalis Arab untuk memperjuangkan kemerdekaan dari kekuasaan Turki Utsmani. Namun, Pemerintah Turki Utsmani menerapkan kebijakan represif bagi setiap kegiatan yang berbau separatis dan siap membungkam aktivitas politik dengan kejam. Sehingga kegiatan politik nasionalis Arab redup dan tidak berkembang sampai terjadinya suatu kejadian dahsyat yang dapat mengguncang cengkeraman Turki Utsmani atas wilayah Arab. Kejadian tersebut adalah Perang Dunia I.⁴

Saat-saat genting situasi politik di Eropa, sebelum Perang Dunia I meletus, Turki Utsmani membutuhkan aliansi dengan negara lain untuk menjaga keutuhan wilayahnya, awalnya Turki Utsmani ingin beraliansi dengan Inggris atau Perancis. Namun, keduanya menolak karena telah menjalin kerjasama

dengan Rusia yang berambisi menguasai wilayah Turki Utsmani. Pimpinan Turki Muda yang dikomandoi oleh Enver Pasha merupakan pengagum Jerman. Dia mempercayai Jerman sebagai satu-satunya negara Eropa yang tidak memiliki ambisi menguasai wilayah Timur Tengah. Oleh karena itu, setelah menjalankan beberapa perundingan, Turki Utsmani sepakat bergabung dengan blok sentral, bersama Jerman dan Austria-Hongaria dalam Perang Dunia I melawan Inggris, Perancis, dan Rusia. Jerman menjanjikan peralatan militer, penasihat militer, dan bantuan keuangan dengan imbalan Khalifah Turki Utsmani mendeklarasikan jihad melawan blok sekutu.

Perang Dunia I pun meletus yang dimulai di Eropa pada 28 Juli 1914. Namun Turki Utsmani baru bergabung pada 11 November 1914. Turki Utsmani yang awalnya diremehkan karena sudah beberapa kali mengalami kekalahan dan kehilangan wilayah sebelum Perang Dunia I ternyata menjadi sekutu yang gigih. Pasukan Turki Utsmani beberapa kali mengalami kemenangan di berbagai pertempuran di front Timur Tengah. Turki Utsmani di awal perang langsung menyerang posisi Inggris di Terusan Suez. Pada pertempuran Gallipoli tahun 1915, Turki Utsmani berhasil bertahan dan mengalahkan pasukan gabungan Perancis, Inggris, dan Negara Persemakmuran kemudian mengalahkan pasukan ekspedisi India di pertempuran Kut Al Amara tahun 2016.⁵

Melihat kegigihan Turki Utsmani di front Timur Tengah, Inggris mencoba memanfaatkan sentimen Arab-Turki untuk memecah kesatuan Turki Utsmani. Melalui Komisaris Tingginya di Mesir, Sir Henry McMahon, Inggris mencoba melobi masyarakat Arab untuk memberontak Turki Utsmani dan mendeklarasikan jihad balasan melawan blok sentral melalui Syarif Husain bin Ali yang berpengaruh bagi bangsa Arab karena posisinya menjadi Gubernur di Mekkah dan statusnya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Setelah korespondensi antara keduanya sampai delapan bulan, Inggris melalui McMahon menjanjikan pengakuan Inggris atas berdirinya Kerajaan Arab merdeka dengan pimpinan Syarif Husain bersama Dinasti Hasyimiyah-nya. Revolusi Arab pun dideklarasikan pada 5 Juni 1916 melalui deklarasi jihad balasan oleh Syarif Husein.⁶

Setelah revolusi itu, Turki Utsmani mulai ambruk dan kehilangan sebagian besar wilayahnya. Secara beruntun provinsi-provinsi Arabnya direbut Blok Sekutu, dari Mesopotamia, Palestina, hingga Suriah pada Oktober 2018, seluruh pasukan Turki Utsmani mundur ke Anatolia dan tidak pernah kembali lagi. Namun, dibalik kesepakatan Inggris-Arab tersebut, Inggris juga menyepakati perjanjian rahasia lain dengan Rusia dan Perancis tentang pembagian wilayah Turki Utsmani, di mana Perancis mendapatkan kontrol atas wilayah Suriah modern, Lebanon modern, sedangkan Inggris mendapatkan wilayah Irak, Transyordania, dan negara-negara Teluk, dan wilayah Palestina disepakati sebagai daerah yang berada di bawah “administrasi internasional”. Kesepakatan tersebut dinamakan Perjanjian Sykes-Picot yang ditandatangani pada Oktober

1916. Inggris selanjutnya membuat sebuah perjanjian baru dengan kaum Yahudi yang bertentangan dengan dua perjanjian sebelumnya, yaitu disepakatinya Deklarasi Balfour pada 2 November 1917. Isi dari perjanjian tersebut menyatakan dukungan Kerajaan Inggris terhadap pembentukan tanah air nasional di Palestina untuk Bangsa Yahudi.⁷

Setelah Perang Dunia I usai pada 11 November 1918 yang dimenangkan oleh blok sekutu, Syarif Husein melalui putranya Amir Faisal memperjuangkan haknya atas seluruh tanah Arab kepada sekutunya di Konferensi Perdamaian Paris tahun 1919 dan Deklarasi Negara Arab di Damaskus. Namun harapan tersebut pupus karena ambisi kolonial Inggris dan Perancis di wilayah tersebut. Kedua negara tersebut langsung memaksakan kontrol mereka atas wilayah Arab berdasarkan Perjanjian Sykes-Picot. Inggris pun memberi lampu hijau bagi bangsa Yahudi untuk menempati daerah Palestina. Kekuatan militer Syarif Husein yang sudah terkuras setelah Perang Dunia I pun diperparah oleh serangan Kelompok Saudi-Wahabi dari Najd, hingga akhirnya wilayah Hijaz lepas dari kekuasaannya. Melalui Solusi Sharifian, Inggris tetap berusaha memenuhi perjanjiannya dengan sekutu Arabnya, yaitu dengan menempatkan dua putra dari Syarif Husein untuk menjadi raja di Transyordania dan Irak, yaitu Amir Abdullah dan Faisal. Amir Abdullah menjadi amir pertama di wilayah Transyordania (Yordania modern) dan Amir Faisal di Irak.⁸

Amir Abdullah membentuk Transyordania sebagai keemiratan dan menyatakan diri sebagai amir pertama pada tahun 1921. Setahun kemudian Transyordania diakui oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB) sebagai sebuah negara, namun masih di bawah mandat Inggris dengan nama Emirat Transyordania. Di bawah mandat Inggris, Transyordania menjadi salah satu koloni yang damai dan stabil dengan biaya yang sangat kecil atas pembayar pajak Inggris. Kemudian pada 25 Mei 1946 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerima akhir dari mandat Inggris di Transyordania, sehingga ia merdeka sepenuhnya. Transyordania pun diubah namanya menjadi “Hashemite Kingdom of Jordan” dalam bahasa Inggris dan “Mamlaka Al-Urduniyyah Al-Hasyimiyah” dalam bahasa Arab dan Abdullah I yang sebelumnya sebagai amir berganti menjadi raja.⁹

Pengaruh Inggris terhadap Politik dan Keamanan Yordania

Di tahun 1918 negara Inggris dan Perancis membagi beberapa wilayah Timur Tengah menjadi wilayah bagian di bawah pengaruh Inggris dan Perancis di mana Yordania di bawah pengaruh mandat dan perwalian Inggris. Kemudian pada tahun 1946, Yordania memperoleh kemerdekaannya menjadi Kerajaan Hasyimiyah Yordania dengan raja yang memimpin yaitu Abdullah Ibnu Al Husain sebagai raja pertama. Di awal tahun 1920-an, sudah mulai bermunculan di Yordania partai-partai politik dan beberapa partai sekuler nasional yang meminta hak kemerdekaan dari Inggris akan tetapi dirasa kurang sempurna,

karena kesadaran politik di wilayah Yordania dengan masyarakat yang masih terpengaruh dari negara Inggris. Kemudian di akhir tahun 1940-an hingga awal tahun 1950-an muncullah ideologi-ideologi agama politik serta beberapa sekuler modern yang merujuk ke Yordania dari negara tetangga Arab.

Apabila dilihat dari aliansi perjanjian London tanggal 26 Maret 1946, disebutkan bahwa Inggris memberikan pola kemerdekaan yang sama seperti yang diberikan kepada negara Irak. Dengan perjanjian tersebut, Inggris mengakui kemerdekaan Yordania kemudian menyetujui untuk perwakilan diplomatik Inggris serta dapat memberikan subsidi kepada para perwakilan tersebut, dengan imbalan Inggris pun turut mempertahankan kerajaan Yordania dari ancaman pihak luar. Inggris pun sepakat dan menempatkan tentara di wilayah Transyordania menggunakan fasilitas komunikasinya dan melatih angkatan perang Yordania.¹⁰

Pengaruh AS terhadap Politik dan Keamanan Yordania

Sistem negara yang dianut Yordania saat ini yaitu monarki konstitusional dengan bentuk pemerintahan parlementer. Hubungan Yordania dengan Amerika Serikat terjalin sejak lama. Sejak kepemimpinan Raja Hussein bin Talal (raja ketiga), Yordania menjadi salah satu sekutu terpenting AS di Timur Tengah. Hubungan tersebut berjalan baik dan Raja Hussein berhasil menjalin hubungan kerja dengan berbagai administrasi AS yang melindungi kerajaannya serta menunjukkan nilainya yang meningkat di mata AS. Hubungan tersebut ditanggapi oleh AS dengan memberikan bantuan sipil, militer, dan hubungan diplomatik bagi kelangsungan Dinasti Hasyimiyah di Timur Tengah. Raja Husein sejak tahun 1967-1999 juga berhasil menjadikan Yordania sebagai salah satu sekutu terdekat dan paling strategis bagi AS di negara-negara Arab. Meskipun Yordania tidak memiliki ikatan sejarah dengan AS, tetapi AS menghargai hubungan dengan Raja Hussein dan Yordania karena lokasi geografisnya dan rajanya yang moderat. Hubungan antara keduanya sangat penting bagi kelangsungan hidup Yordania dan mempertahankan posisi AS di Timur Tengah pada Perang Dingin.¹¹

Selama 32 tahun pemerintahan Raja Hussein (1952-1999), Ia telah bekerjasama dengan tujuh Presiden AS untuk membangun hubungan baik antara keduanya. Pada awal masa pemerintahan Richard Nixon sebagai Presiden AS, Ia membawa perubahan mendasar bagi kedua negara dengan berusaha mencapai perdamaian abadi di kawasan Arab akibat dari Perang Enam Hari (Six Days War) tahun 1967. Meskipun perdamaian tersebut gagal, tetapi dapat dilihat bahwa AS memandang Yordania sebagai sekutu penting di kawasan itu baik untuk menjaga perdamaian Israel maupun untuk menghentikan ekspansi Uni Soviet. Akibat terjadinya perang antara negara Arab dan Israel yang memanas, banyak pemimpin dari Arab, termasuk Raja Hussein, mendesak Presiden Nixon untuk membantu melakukan perdamaian. Akhirnya,

Sekretaris Negara AS, William P. Rogers, memberikan pidato yang mengenalkan mengenai Rogers Plan untuk memulai kembali proses perdamaian di Timur Tengah. Rencana itu akhirnya gagal karena Israel yang tidak menyetujui isi dari Rogers Plan karena mereka menganggap upaya tersebut hanya untuk menenangkan negara-negara Arab saja dengan mengorbankan Israel.

Pada masa pemerintahan Ronald Reagan, Ia berusaha untuk menyelesaikan konflik antara negara-negara Arab dengan Israel. Wilayah geografi Yordania yang strategis dan kesediaan mereka yang konsisten dalam bekerja dengan AS, membuatnya memainkan peran penting dalam upaya Reagan untuk membawa perdamaian antara negara Arab dan Israel. Beralih ke pemerintahan Bill Clinton yang memainkan peran penting dalam membantu Yordania memulihkan konflik dengan Israel. Setelah sekian lama berperang dengan Israel, di tahun 1994, pemimpin AS (Bill Clinton) menjadi saksi tercapainya Perjanjian Perdamaian Israel-Yordania.

Kita ketahui bahwa hubungan antara Yordania dan AS sangat erat dan masih berhubungan baik sejak kepemimpinan Raja Hussein bin Talal, hingga sekarang. Yordania yang menjadi sekutu AS mendapatkan banyak keuntungan bagi negaranya, salah satunya di bidang keamanan. Yordania telah menjadi mitra penting bagi AS dalam berbagai masalah keamanan di tingkat regional dan memiliki tujuan bersama agar terciptanya kestabilan, keamanan, dan kemakmuran di Timur Tengah. Selain itu, keduanya bekerja sama demi meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan, maritim, transfer senjata, keamanan siber, dan counterterrorism. Yordania juga berpartisipasi dengan pasukan-pasukan AS dan Koalisi Global untuk melawan Al-Qa'ida, ISIS, serta afiliasi global dan regionalnya. AS menjadikan Yordania sebagai prioritas dalam memberikan bantuan stabilitas dan keamanan sejak akhir 1960-an. Kedua negara tersebut telah memperingati bantuan luar negeri bilateral dalam tiga nota kesepahaman (MoU) yang tidak mengikat di tahun 2010-2014, 2015-2017, dan 2018-2022.

Hal tersebut menunjukkan komitmen AS yang kuat selama bertahun-tahun dalam keamanan dan stabilitas Yordania. MoU tersebut berisi mengenai keamanan kritis, kerja sama ekonomi, dan mengurangi dampak krisis regional, seperti ketegangan pengungsi Suriah dan Irak yang berdampak pada anggaran Yordania (U.S. Department of State. 2021). Dalam bidang militer, kedua negara tersebut aktif dalam melakukan transaksi alat-alat perang yang digunakan untuk menjaga stabilitas Yordania dari konflik-konflik yang terjadi. Di tahun 1996, AS memberikan Yordania status Major non-NATO Ally (MNNA), yang mana membuat Yordania dapat memenuhi syarat untuk menerima kelebihan senjata pertahanan AS, pinjaman peralatan untuk penelitian, dan pengembangan kerja sama. Dalam lima tahun terakhir, Yordania telah menerima kelebihan senjata-senjata pertahanan AS, seperti dua pesawat C-130, rudal HAWK MEI-23E, dan truk kargo.¹² AS telah banyak membantu Yordania dalam menangani konflik dan

perang yang terjadi di negara-negara Arab. Hal ini akibat dari hubungan bilateral yang dijaga dengan baik oleh kedua negara sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak.

AS memiliki pangkalan militer di Yordania, Muwaffaq Salti Air Base, yang berada di dekat perbatasan Suriah dan Irak. Pangkalan militer tersebut dibuat untuk memudahkan AS melakukan serangan terhadap Kelompok Negara Islam (ISIS).¹³ Selain itu, militer AS dan Yordania juga sering melakukan latihan bersama melalui berbagai program. Pada September 2022, terdapat latihan militer yang dilakukan oleh AS, Yordania dan 28 negara lainnya di Yordania. Program tersebut bernama Exercise Eager Lion yang dilakukan selama dua minggu. Program tersebut menjadi latihan militer terbesar di kawasan yang bertujuan untuk bertukar keahlian militer, meningkatkan keahlian interoperabilitas di antara negara-negara mitra. Latihan tersebut berguna untuk mengatasi tantangan di darat, laut, udara, serta dunia maya.¹⁴ Pada masa pandemi COVID-19, Yordania dan AS terus memperkuat kemitraan militer mereka melalui program Jordan Operational Engagement Program (JOEP). Program ini menjadi program pelatihan terbesar yang didanai oleh Departemen Pertahanan AS.¹⁵

Analisis Stabilitas Politik dan Keamanan Yordania

Yordania dengan Monarki Hashemite-nya pada upaya kemerdekaannya dari Inggris telah melakukan pendekatan bandwagoning ke negara penjajah tersebut. Pendekatan tersebut dipilih untuk mendapatkan kemerdekaan penuh dari Inggris. Kerajaan Yordania lebih memilih merapat ke Inggris yang sejatinya menjadi ancaman kedaulatannya. Namun dengan pendekatan tersebut, Yordania dapat terhindar dari perebutan kekuasaan dalam negeri, sehingga pada awal pendiriannya, Yordania tidak menghadapi gejolak politik dalam negeri yang signifikan. Struktur internasional di Timur Tengah yang dinilai masih rentan pada masa Perang Dingin tersebut mampu dihadapi Yordania.

Selain itu seperti yang disebutkan di atas, Yordania mendapatkan pelatihan angkatan perangnya dari Inggris, sehingga dapat memperkuat postur pertahanan dalam negerinya, meskipun Yordania harus rela pada penempatan tentara Inggris di wilayah kedaulatannya. Pengaruh Inggris di Yordania dominan berlangsung di masa-masa mandatnya di Emirat Transyordania sampai awal-awal kemerdekaan penuh Yordania. Pengaruh tersebut kemudian berpindah ke AS.

Pada masa Perang Dingin, Yordania sudah dipercaya AS untuk mempertahankan posisi AS dan membendung pengaruh Uni Soviet di Timur Tengah pada Perang Dingin. Selain itu, AS menghargai hubungan dengan Raja Hussein (Raja Ketiga Yordania), karena lokasi geografisnya dan rajanya yang moderat. Namun hubungan tersebut belum meningkat ke tahap aliansi, karena sikap Yordania yang memusuhi Israel (sekutu utama AS).¹⁶

Sebelum normalisasi dengan Israel, Yordania menganggap Israel sebagai sumber ancaman. Yordania bersama Suriah dan Mesir berperang melawan Israel dalam Perang Enam Hari tahun 1967 dan membantu Suriah dan Mesir melawan Israel di Perang Yom Kippur 1973. Dua peperangan tersebut dimenangkan oleh Israel yang menjadikannya kekuatan tangguh di kawasan. Hal tersebut membuat negara-negara Arab mengubah cara pandanganya terhadap Israel.

Diawali oleh Mesir pada 1978, Mesir di bawah Presiden Anwar Sadat menjadi negara Arab pertama yang mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat. Lalu diikuti Yordania yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 1994 di Arabah. Perjanjian damai tersebut lalu dilanjutkan Deklarasi Washington yang ditandatangani oleh Raja Hussein, PM Yitzhak Rabin, dan Presiden AS Bill Clinton.¹⁷

Tindakan yang dilakukan Yordania merupakan bentuk bandwagoning dalam hubungannya ke Israel dan AS. Yordania memilih merapat lebih dekat kepada AS dengan pengakuan terhadap kedaulatan Israel. Sehingga dua tahun setelah normalisasi tersebut, Yordania mendapat status Major.non-NATO.Ally (MNNA) oleh AS. Status tersebut membuat Yordania mendapatkan akses teknologi canggih militer AS, seperti yang disebutkan di atas. Sehingga Yordania dengan kekuatan internal dan eksternalnya dapat menghadapi dinamika struktur regional di Timur Tengah.

Seperti yang dilakukan Inggris, AS juga mendirikan pangkalan militernya di Yordania, tepatnya di Muwaffaq Salti Air Base yang berlokasi di antara perbatasan Suriah dan Irak. AS berdalih pangkalan militer tersebut digunakan sebagai sarana penyerangan AS ke kelompok teroris ISIS yang mengancam kedaulatan negara-negara Timur Tengah. Hal tersebut ternyata terbukti memiliki pengaruh dalam stabilitas politik dan keamanan Yordania dari dinamika struktur internasional dan kawasan. Yordania dengan Monarki Hashemite-nya masih stabil hingga saat ini.¹⁸

Kesimpulan

Yordania pernah menjadi bagian dari Kekhalifahan Turki Utsmani selama kurang lebih empat abad (1517 M-1918 M). Setelah pemerintahan Turki Utsmani runtuh, muncul Perang Dunia pertama dimulai tahun 1914 dan berakhir di tahun 1918 dimenangkan oleh blok sekutu. Setelah Perang Dunia II, Amir Abdullah membentuk Transyordania sebagai keemiratan dan menyatakan diri sebagai amir pertama pada tahun 1921. Transyordania diakui oleh PBB pada tahun 25 Mei 1946, dan berganti nama menjadi Hashemite Kingdom of Jordan dalam bahasa Inggris dan Mamlaka Al-Urduniyyah Al-Hasyimiyah dalam bahasa Arab. Yordania terbentuk menjadi negara modern pada tahun 1921. Hubungan Yordania dengan Inggris dan AS menjadi sangat dekat dan pada pemerintahan Raja Hussein bin Talal, Ia membangun hubungan bilateral dengan AS dan

menjadi sangat dekat. Hubungan antara Yordania dan Amerika Serikat telah berlangsung sejak lama dan menjadi negara sekutu terpenting bagi AS di Timur Tengah. Secara geografis, Yordania sangat bergantung kepada bantuan dari negara lain karena negara tersebut tidak memiliki banyak sumber daya alam. Bantuan yang diberikan oleh AS berupa ekonomi dan militer. Hubungan antara Yordania dan AS juga berdampak pada aspek politik yang menjadikannya sebagai salah satu negara berorientasi Barat dan memiliki kestabilan politik.

Endnote

- ¹ Jackson, R. S. (1919). Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan.
- ² Montratama dan Yani, Y. M. (2017). Quo Vadis Politik Luar Negeri Indonesia. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- ³ Ibid.,
- ⁴ Rogan, E. (2018). Dari Puncak Khilafah: Sejarah Arab-Islam Sejak Era Kejayaan Khilafah Utsmaniyah. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- ⁵ Rogan, E. (2018). Dari Puncak Khilafah: Sejarah Arab-Islam Sejak Era Kejayaan Khilafah Utsmaniyah. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta
- ⁶ Budiman, A. (2013). Pengaruh Nasionalisme terhadap Runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani. Program Studi Pendidikan Sejarah-FKIP-UNIGAL, 159.
- ⁷ Rogan, E. (2018). Dari Puncak Khilafah: Sejarah Arab-Islam Sejak Era Kejayaan Khilafah Utsmaniyah. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- ⁸ Rogan, E. (2018). Dari Puncak Khilafah: Sejarah Arab-Islam Sejak Era Kejayaan Khilafah Utsmaniyah. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- ⁹ Edarabia. (2022). Retrieved from <https://www.edarabia.com/>:
<https://www.edarabia.com/jordan/independence-day/>
- ¹⁰ Mahmuddin, 2019
- ¹¹ Ackerson, Patrick. 2016. King Hussein and the Presidents: Jordan and American Relations Since 1967. <https://shareok.org/handle/11244/48772>; 2-15
- ¹² Congressional Research Service. 2018. Jordan: Background and U.S. Relations. <https://crsreports.congress.gov>
- ¹³ Vandiver, John. "US troops deployed to Israel get a new barracks." Stars and Stripes. Sep. 19, 2017. <https://www.stripes.com/news/us-troops-deployed-to-israel-get-a-new-barracks-1.488440>.
- ¹⁴ U.S. Mission Jordan. 2022. Jordan Hosts U.S. Forces and Partner Nation for Premiere Exercise Eager Lion. Press Release. <https://jo.usembassy.gov/jordan-hosts-u-s-forces-and-partner-nations-for-premiere-exercise-eager-lion/>
- ¹⁵ Wang, Bryan Elliott, Ernest. 2020. U.S. Army and Jordan Armed Forces Continue Partnership Mission Despite COVID-19 Challenges. <https://www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-Article-View/Article/2197305/us-army-and-jordan-armed-forces-continue-partnership-mission-despite-covid-19-c/>
- ¹⁶ Ackerson, Patrick. 2016. King Hussein and the Presidents: Jordan and American Relations Since 1967. <https://shareok.org/handle/11244/48772>; 2-15
- ¹⁷ Arbar, Thea Fathanah. 2022. Ini Deretan Negara Arab yang Akhirnya Damai dengan Israel. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220715080346-4-355820/ini-deretan-negara-arab-yang-akhirnya-damai-dengan-israel>

¹⁸ Ibid.,

Daftar Pustaka

- Ackerson, Patrick. 2016. King Hussein and the Presidents: Jordan and American Relations Since 1967. <https://shareok.org/handle/11244/48772>
- Arbar, Thea Fathanah. 2022. Ini Deretan Negara Arab yang Akhirnya Damai dengan Israel. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220715080346-4-355820/ini-deretan-negara-arab-yang-akhirnya-damai-dengan-israel>
- Bunjamin, Mahmudin. "Pembaruan Undang-undang Perkawinan Yordania dan Relevansinya terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern. ASAS 11.2 (2019): 51-76.
- Budiman, A. (2013). Pengaruh Nasionalisme terhadap Runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani. Program Studi Pendidikan Sejarah-FKIP-UNIGAL, 159.
- Congressional Research Service. 2018. Jordan: Background and U.S. Relations. <https://crsreports.congress.gov>
- Edarabia. (2022). Retrieved from <https://www.edarabia.com/:https://www.edarabia.com/jordan/independence-day/>
- Jackson, R. S. (1919). Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan.
- Montratama dan Yani, Y. M. (2017). Quo Vadis Politik Luar Negeri Indonesia. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rogan, E. (2018). Dari Puncak Khilafah: Sejarah Arab-Islam Sejak Era Kejayaan Khilafah Utsmaniyah. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- U.S. Department of State. 2021. U.S. Security Cooperation with Jordan. <https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-jordan/>
- U.S. Mission Jordan. 2022. Jordan Hosts U.S. Forces and Partner Nation for Premiere Exercise Eager Lion. Press Release. <https://jo.usembassy.gov/jordan-hosts-u-s-forces-and-partner-nations-for-premiere-exercise-eager-lion/>
- Vandiver, John. "US troops deployed to Israel get a new barracks." Stars and Stripes. Sep. 19, 2017. <https://www.stripes.com/news/us-troops-deployed-to-israel-get-a-new-barracks-1.488440>.
- Wang, Bryan Elliott, Ernest. 2020. U.S. Army and Jordan Armed Forces Continue Partnership Mission Despite COVID-19 Challenges. <https://www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-Article-View/Article/2197305/us-army-and-jordan-armed-forces-continue-partnership-mission-despite-covid-19-c/>